



Digital Piety and Religious Moderation: Negotiating Islamic Authority among Santri in a Pesantren in Bandung Regency

Asep Shodiqin¹, Ali Khosim², Wahyu Iryana³.

1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; email: asep_shodiqin@yahoo.com

2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; email: ali.khosim12@gmail.com

3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; email: wahyu_iryana@yahoo.com

* Correspondence: asep_shodiqin@yahoo.com

Abstract: This study aims to analyze how digital piety among santri in Islamic boarding schools (pesantren) in Bandung Regency shapes the ecology of Islamic authority and influences diverse forms of religious moderation in everyday practice. This study is important because the digitalization of da‘wah has expanded santri’s religious references while simultaneously carrying the potential to generate polarization when not accompanied by adequate literacy and guidance. The research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with santri, observation of religious activities within the pesantren environment, and examination of relevant digital artifacts, such as religious content accessed and shared by participants. The data were analyzed using thematic analysis to identify patterns of religious practice, authority references, and emerging mechanisms of negotiation. The findings indicate that digital piety emerges as a structured religious routine through the consumption of short religious lectures, practices of saving and sharing content emphasizing ethical and moral values, and the curation of content perceived as “safe” and non-confrontational. Within a plural ecology of Islamic authority, kiai and pesantren teachers remain the final sources of religious legitimacy, while digital religious authorities function primarily as initial triggers of knowledge that are negotiated through account selection, interaction restraint, and cross-checking with pesantren authorities. As a result, religious moderation among santri appears more strongly as a lived social practice operating contextually between pesantren spaces and digital environments. The implications of this study highlight the importance of strengthening digital religious literacy, establishing accessible verification mechanisms, and developing pesantren-based content curation to reinforce religious moderation in the era of social media. The originality of this research lies in its articulation of the micro-level mechanism of “authority negotiation” as a bridge between digital piety and religious moderation, thereby offering both conceptual and empirical contributions to the fields of digital religion, Islamic authority, and religious moderation within pesantren contexts.

Keywords: digital piety; religious moderation; Islamic authority; santri; pesantren; social media.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kesalehan digital santri di pesantren anak jalanan di kabupaten Bandung membentuk ekologi otoritas keislaman dan berdampak pada ragam moderasi beragama dalam praktik keseharian. Kajian ini penting karena digitalisasi dakwah memperluas sumber rujukan keagamaan santri sekaligus berpotensi memicu polarisasi jika tidak diiringi literasi dan pendampingan yang memadai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan santri, observasi aktivitas keagamaan di lingkungan pesantren, serta penelusuran artefak digital yang relevan (misalnya konten yang diakses/dibagikan). Data dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola praktik, rujukan otoritas, dan mekanisme negosiasi yang berkembang. Temuan menunjukkan bahwa kesalehan digital hadir sebagai rutinitas religius terjadwal melalui konsumsi kajian singkat, praktik menyimpan (save) dan membagikan konten bertema adab–akhlik, serta kurasi konten yang dianggap “aman/adem”. Dalam ekologi otoritas yang plural, kiai/ustaz pesantren tetap menjadi rujukan final, sementara

otoritas digital berfungsi sebagai pemantik pengetahuan yang dinegosiasikan melalui seleksi akun, pembatasan interaksi, dan *cross-check* kepada otoritas pesantren. Dampaknya, moderasi beragama santri tampak lebih kuat sebagai praktik sosial yang bersifat kontekstual antara ruang pesantren dan ruang digital. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan literasi digital-keagamaan, mekanisme rujukan cepat, serta kurasi dan produksi konten pesantren untuk meneguhkan moderasi beragama di era media sosial. Keaslian penelitian ini terletak pada penjelasan mekanisme mikro “negosiasi otoritas” sebagai jembatan antara kesalehan digital dan moderasi beragama, sehingga menawarkan kontribusi konseptual dan empiris bagi kajian digital religion, otoritas Islam, dan moderasi beragama di lingkungan pesantren.

Kata Kunci: kesalehan digital; moderasi beragama; otoritas keislaman; santri; pesantren; media sosial.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan cara masyarakat beragama, khususnya dalam mengakses dan memaknai ajaran keislaman. Media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi ruang baru dakwah, rujukan keagamaan, serta pembentukan identitas religius generasi muda Muslim. Di Indonesia, penetrasi internet yang telah melampaui 78% populasi dengan dominasi pengguna usia muda (APJII, 2023) mempercepat pergeseran praktik keberagamaan dari ruang institusional formal menuju ruang digital yang terbuka, cepat, dan lintas otoritas. Transformasi ini membawa dampak luas terhadap pola interaksi sosial dan otoritas keagamaan, karena pengetahuan agama tidak lagi sepenuhnya diperoleh melalui figur dan lembaga tradisional, melainkan juga melalui konten digital yang dibentuk oleh logika algoritma dan popularitas.

Dalam konteks pesantren, fenomena tersebut menghadirkan dinamika yang kompleks. Santri yang sebelumnya berinteraksi dengan ajaran Islam melalui pengajian kitab dan relasi langsung dengan kiai dan ustaz, kini berhadapan dengan beragam wacana keagamaan digital yang sering kali hadir dalam bentuk potongan ceramah tanpa konteks yang utuh. Kondisi ini mempertemukan otoritas keagamaan tradisional pesan-

tren dengan otoritas digital yang berpotensi memengaruhi cara santri memahami perbedaan dan mempraktikkan moderasi beragama. Di tengah meningkatnya polarisasi dan kontestasi identitas keagamaan di ruang digital, isu moderasi beragama menjadi semakin penting sebagai upaya menjaga harmoni sosial dan keberagaman (Kementerian Agama RI, 2019). Oleh karena itu, mengkaji kesalehan digital santri dan implikasinya terhadap moderasi beragama menjadi relevan baik secara akademik, untuk memahami transformasi Islam di era digital, maupun secara praktis sebagai dasar penguatan kebijakan pendidikan dan literasi digital-keagamaan di lingkungan pesantren.

Penelitian-penelitian sebelumnya pada dasarnya bergerak dalam tiga rumpun yang saling berdekatan tetapi belum sepenuhnya bertemu. Rumpun pertama adalah kajian tentang kesalehan digital yang menempatkan media sosial sebagai ruang praktik keberagamaan baru, di mana ekspresi religius, identitas, dan etika bermedia terbentuk melalui interaksi dengan platform, bahkan dapat memunculkan ketegangan moral seperti persoalan *riyā'* atau kecemasan religius ketika kesalehan tampil di ruang publik digital (Husein, 2018). Rumpun kedua berfokus pada otoritas Islam dan media baru yang menunjukkan bahwa internet memperluas ruang publik Muslim dan mempluralisasi sumber rujukan, sehingga otoritas keagamaan menjadi lebih berjejaring dan terbuka; dalam konteks Indonesia, fenomena ini tampak dalam pola pencarian pengetahuan agama/“fatwa” secara daring yang mengubah cara otoritas dikenali dan dibenarkan (Eickelman & Anderson, 2003; Hosen, 2008). Sementara itu, rumpun ketiga adalah studi moderasi beragama di pesantren yang umumnya menekankan jalur institusional, misalnya internalisasi nilai moderasi melalui kurikulum, tradisi, dan peran kiai/ustaz yang menegaskan pesantren sebagai ruang pembentuk sikap moderat. Meski ketiga rumpun ini telah memberikan landasan penting, celah yang masih menonjol adalah terbatasnya riset yang menjelaskan “mekanisme penghubung” antara kesalehan digital santri dan praktik moderasi beragama, padahal pada level keseharian santri justru terjadi proses negosiasi otoritas, melalui seleksi konten yang dianggap aman/adem, pembatasan keterlibatan dalam konten debat, dan *cross-check* kepada kiai/ustaz.yang menentukan apakah paparan digital memperkuat moderasi atau justru memicu polarisasi; karena itu, penelitian ini diperlukan untuk memperlihatkan bagaimana moderasi beragama diproduksi secara kontekstual melalui negosiasi otoritas dalam ekologi keberagamaan digital pesantren.

Berdasarkan celah literatur yang belum banyak menjelaskan bagaimana kesalehan digital santri berhubungan dengan moderasi beragama melalui mekanisme negosiasi otoritas, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan

dan menganalisis proses tersebut dalam konteks pesantren di Kabupaten Bandung. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan: pertama, mendeskripsikan praktik kesalehan digital santri sebagai rutinitas religius di sela kegiatan pesantren, termasuk kebiasaan mengakses kajian singkat, menyimpan (save) konten bertema adab–akhlik, serta membagikannya kepada teman sebaya; kedua, menjelaskan logika kurasi santri terhadap konten keagamaan digital serta strategi *cross-check* kepada ustaz/kiai ketika menemukan konten yang dirasa membingungkan atau tidak sejalan dengan pengajian; ketiga, memetakan ekologi otoritas keislaman yang menjadi rujukan santri (kiai/ustaz pesantren, ustaz media sosial, komunitas daring, dan logika platform/algoritma) beserta pola negosiasi yang muncul ketika sumber-sumber otoritas tersebut beririsan atau berkontradiksi; dan keempat, menjelaskan bagaimana praktik kesalehan digital, kurasi, dan negosiasi otoritas tersebut berdampak pada ragam moderasi beragama santri sebagai praktik sosial sehingga penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan “jalur proses” yang menghubungkan keberagamaan digital santri dan praktik moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan rumusan masalah dan temuan-temuan awal dalam literatur tentang kesalehan digital, pluralisasi otoritas Islam, dan moderasi beragama, penelitian ini membangun argumen bahwa kesalehan digital santri tidak bekerja secara langsung membentuk moderasi beragama, melainkan melalui mekanisme perantara berupa negosiasi otoritas keislaman di tingkat keseharian. Argumen sementara penelitian ini menyatakan bahwa semakin intens santri berinteraksi dengan konten keagamaan digital (misalnya melalui kajian singkat dan praktik *save/share*), semakin besar kemungkinan munculnya ekologi rujukan yang plural; namun dalam konteks pesantren, pluralisasi rujukan tersebut cenderung tidak berujung pada pelemahan otoritas tradisional karena ditopang oleh nilai adab dan struktur institusional pesantren yang mendorong santri melakukan kurasi konten “aman/adem” serta *cross-check* kepada Kiai/ustaz ketika menghadapi konten yang konfrontatif atau membingungkan, sehingga proses negosiasi ini berfungsi sebagai “rem” yang mengarahkan paparan digital pada praktik moderasi beragama (misalnya kehati-hatian menyikapi perbedaan, menghindari labelisasi, dan menjaga harmoni relasi sosial); dengan kata lain, teknologi dan platform digital memfasilitasi akses wacana keagamaan yang cepat dan beragam, tetapi nilai-nilai pesantren dan strategi kurasi-verifikasi santri menentukan apakah keberagamaan digital tersebut memperkuat moderasi atau justru memicu polarisasi, sejalan dengan pemahaman bahwa praktik keberagamaan di ruang digital dibentuk oleh logika media (*digital religion/mediatization*) dan perubahan ruang publik Muslim yang mempluralkan otoritas (Campbell & Tsuri, 2021; Hjarvard, 2008; Eickelman & Anderson, 2003; Hosen, 2008).

2. Metode Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini adalah santri pesantren jalanan At-Taamur di Kabupaten Bandung sebagai aktor utama yang mengalami secara langsung perjumpaan antara praktik kesalehan digital, otoritas keislaman tradisional, dan wacana moderasi beragama. Fokus penelitian diarahkan pada pengalaman, praktik, serta proses negosiasi makna yang dilakukan santri dalam mengakses, menafsirkan, dan mempraktikkan ajaran keagamaan di ruang digital dan ruang pesantren. Selain individu santri, unit analisis juga mencakup artefak digital keagamaan, seperti konten media sosial, potongan ceramah, serta aktivitas berbagi konten yang menjadi bagian dari praktik keberagamaan sehari-hari.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami makna, proses, dan dinamika sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan perlu ditelusuri melalui pengalaman subjektif dan interaksi sosial para aktor (Creswell, 2014). Desain studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena kesalehan digital dan moderasi beragama dalam konteks pesantren tertentu sebagai ruang sosial yang memiliki karakter, tradisi, dan struktur otoritas khas (Yin, 2018). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali fenomena secara kontekstual dan holistik, terutama dalam melihat relasi antara praktik digital dan nilai-nilai pesantren.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan santri pesantren, yang dipilih secara purposif berdasarkan intensitas penggunaan media digital dan keterlibatan dalam aktivitas keagamaan. Informan terdiri dari santri tingkat menengah dan akhir yang aktif mengakses media sosial, dengan jumlah informan sebanyak 6 orang. Data sekunder meliputi dokumen pesantren (aturan penggunaan gawai, kegiatan keagamaan), literatur terkait moderasi beragama, serta artefak digital berupa konten keagamaan yang dikonsumsi atau dibagikan oleh santri selama proses penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur dengan santri untuk menggali pengalaman, persepsi, serta strategi mereka dalam mengelola konten keagamaan digital. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara terbuka agar informan dapat menjelaskan pandangannya secara naratif (Kvale & Brinkmann, 2009). Kedua, observasi lapangan dilakukan untuk mengamati aktivitas keseharian santri, suasana interaksi sosial, serta praktik keberagamaan kolektif di lingkungan pesantren. Ketiga, observasi digital dilakukan terhadap jenis konten, tema ceramah, dan pola interaksi keagamaan yang muncul di media sosial santri sebagai bagian dari pendekatan etnografi digital ringan (Pink et al., 2016). Seluruh proses pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian dan anonimitas informan.

Data dianalisis menggunakan analisis tematik, yaitu teknik analisis yang bertujuan mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data kualitatif (Braun & Clarke, 2006). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap: (1) transkripsi wawancara dan pencatatan hasil observasi, (2) pembacaan berulang untuk memahami keseluruhan data, (3) pemberian kode awal terhadap unit makna yang relevan, (4) pengelompokan kode menjadi kategori dan tema utama, serta (5) penafsiran tema dengan mengaitkannya pada kerangka teori kesalehan digital, otoritas keislaman, dan moderasi beragama. Untuk meningkatkan validitas temuan, peneliti melakukan triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan data wawancara, observasi, dan artefak digital (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

Result

Lanskap Kesalehan Digital Santri di Pesantren Kabupaten Bandung

Hasil temuan wawancara dengan beberapa santri menunjukkan bahwa kesalehan digital hadir sebagai rutinitas religius yang terjadwal dalam sela-sela aktivitas pesantren. Seorang informan menyatakan bahwa ia “lebih sering mendengar kajian singkat lewat TikTok atau YouTube setelah ngaji malam, karena durasinya pendek dan langsung ke inti,” sementara informan lain menuturkan kebiasaannya “menyimpan (save) potongan ceramah bertema adab dan akhlak untuk diputar ulang saat merasa futur.” Pola ini menggambarkan bahwa konsumsi konten keagamaan tidak lagi hanya bergantung pada ruang pengajian formal, melainkan juga dibentuk oleh fitur platform, seperti rekomendasi video, daftar akun yang diikuti, dan kemudahan menyimpan/berbagi, yang membuat praktik beragama bergerak ke format yang lebih ringkas, repetitif, dan personal (Campbell & Tsuria, 2021; Hjarvard, 2008).

“Kalau di pesantren itu kan kegiatan padat ya, jadi saya biasanya pegang HP itu pas waktu yang memang longgar, misalnya habis [ngaji malam/ashar/ba’da isya]. Saya bukan yang scrolling nggak jelas, tapi memang cari yang ‘ngingetin’. Yang sering saya buka itu [TikTok/YouTube/Instagram], karena di situ ada kajian-kajian pendek. Kadang satu menit, dua menit, tapi kena di hati. Saya suka yang bahas adab ke orang tua/akhlak pergaulan/motivasi ibadah (Informan 1, Lq).

Selain konsumsi, santri juga memperlihatkan logika kurasi konten yang mereka anggap “aman” dan sesuai adab pesantren. Beberapa informan menyebut bahwa mereka cenderung mengikuti akun yang “nggak provokatif, nggak gampang menyalahkan, dan penyampaiannya adem,” serta menghindari konten yang memicu perdebatan tajam di kolom komentar, terutama pada isu khilafiyah atau labelisasi kelompok. Dalam situasi menemukan konten yang “membingungkan” atau terasa bertentangan dengan pelajaran di pesantren, informan menggambarkan strategi *cross-check* kepada ustaz/kakak pembina atau memilih “balik lagi ke rujukan pengajian” agar tidak terjebak pada potongan yang keluar konteks. Temuan ini menegaskan bahwa kesalehan digital bekerja bukan hanya sebagai akses informasi agama, tetapi juga sebagai praktik pengelolaan diri dan penjagaan otoritas pesantren di ruang media yang memiliki logika viralitas dan polarisasi (Campbell & Tsuria, 2021; Hjarvard, 2008).

“Kalau ketemu video bagus, saya biasanya [save] dulu, terus nanti saya ulang lagi pas ngerasa malas atau futur. Saya juga follow beberapa ustaz yang menurut saya penyampaiannya enak, kayak [inisial/nama akun], soalnya beliau kalau ngomong tuh nggak nyalah-nyalahin, lebih ngajak. Kadang saya juga share ke teman kamar, biar sama-sama diingetin. Jadi buat saya, HP itu bukan cuma hiburan, tapi kayak ‘teman pengingat’ juga, asal dipilih kontennya.” (Informan 2, Ak).

Setelah memetakan praktik kesalehan digital sebagai rutinitas harian santri temuan wawancara juga memperlihatkan adanya mekanisme kurasi yang ketat terhadap konten keagamaan di media sosial. Santri tidak

menerima informasi agama secara pasif, melainkan menilai konten berdasarkan ukuran “aman”, “adem”, dan “sesuai adab pesantren”, sekaligus menghindari materi yang berpotensi memicu perdebatan atau kebingungan. Pola kurasi ini tampak melalui indikator konten yang dipilih dan dihindari, strategi *cross-check* kepada otoritas pesantren, serta pembatasan interaksi di ruang komentar. Untuk memperjelas pola tersebut, Tabel 2 menyajikan ringkasan logika kurasi konten “aman” dan sesuai adab pesantren beserta strategi yang digunakan santri saat berhadapan dengan konten yang dianggap problematik.

Tabel 2. Logika Kurasi Konten “Aman” dan Sesuai Adab Pesantren

Aspek kurasi	Indikator “aman/adem” menurut santri	Indikator “diwaspadai/dianggap memicu debat”	Strategi santri saat menemukan konten problematik	Dampak pada praktik kesalehan digital
Gaya penyampaian	Tidak provokatif; tidak mudah menyalahkan; mengajak	Menyerang pihak lain; menghakimi; memantik konflik komentar	Skip/abaikan; cross-check ke ustaz/kakak pembina; kembali ke rujukan pengajian	Kesalehan digital menjadi praktik terkontrol (self-regulation)
Kesesuaian dengan adab pesantren	Menenangkan; fokus akhlak; memotivasi ibadah	Konten khilafiyah yang “keras”; labelisasi kelompok; perdebatan tajam	Verifikasi ke otoritas pesantren; memilih konten yang lebih “menjaga adab”	Otoritas pesantren tetap jadi rujukan penentu
Interaksi di platform	Minim konflik; komentar tidak gaduh	Komentar panas/polarisasi; “perang dalil”	Menghindari komentar; membatasi konsumsi; tidak membagikan konten tersebut	Praktik berbagi (share) menjadi selektif

Secara sederhana, temuan ini menunjukkan bahwa kesalehan digital santri tidak berlangsung secara bebas tanpa kontrol, melainkan dijalankan melalui proses seleksi yang sadar dan berhati-hati. Santri memanfaatkan media sosial sebagai sarana pengingat keagamaan, namun pada saat yang sama mereka menetapkan batasan terhadap jenis konten yang dikonsumsi dan dibagikan. Konten yang dianggap menenangkan, berfokus pada adab dan akhlak, serta tidak memicu konflik cenderung diterima dan disebarluaskan, sementara materi yang bernuansa provokatif atau berpotensi menimbulkan perdebatan justru dihindari. Ketika menghadapi konten yang dirasa membingungkan atau tidak sejalan dengan pengajaran pesantren, santri memilih untuk melakukan *cross-check* kepada ustaz atau kembali pada rujukan pengajian formal. Dengan demikian, praktik kesalehan digital dipahami bukan sekadar aktivitas mengakses informasi agama, tetapi sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi digital dan kepuahan terhadap nilai-nilai adab serta otoritas pesantren.

Temuan tentang kebiasaan santri mengurasi konten yang dianggap “aman/adem”, menghindari materi yang memicu labelisasi dan perdebatan, serta melakukan *cross-check* ke ustaz menunjukkan bahwa kesalehan digital bukan sekadar penggunaan gawai, melainkan praktik keberagamaan yang dimediasi oleh fitur dan kultur platform sehingga memperkaya kajian *digital religion* dan *mediatization* dengan bukti bahwa otoritas pesantren tetap menjadi rujukan final dalam ekologi otoritas yang makin plural dan digital, sementara praktik seleksi-verifikasi tersebut menjadi mekanisme konkret yang membantu menjaga orientasi moderasi beragama (misalnya mengutamakan adab, menolak provokasi, dan mengurangi konflik) pada level keseharian santri (Campbell & Tsuria, 2021; Hjarvard, 2008; Eickelman & Anderson, 2003; Kementerian Agama RI, 2019).

Ekologi Otoritas Keislaman dan Pola Negosiasi Otoritas

Hasil wawancara menunjukkan bahwa santri berada dalam ekologi otoritas keislaman yang semakin plural, di mana rujukan keagamaan tidak hanya bersumber dari kiai dan ustaz pesantren, tetapi juga dari ustaz media sosial, komunitas dakwah digital, serta rekomendasi konten yang muncul melalui algoritma platform. Sejumlah informan mengungkapkan bahwa mereka tetap menempatkan kiai sebagai rujukan utama dalam persoalan keagamaan yang bersifat prinsipil, namun pada saat yang sama menjadikan konten digital sebagai pintu awal untuk memperoleh pemahaman atau penjelasan praktis. Seorang santri menuturkan bahwa “kalau soal hukum

yang berat tetap tanya ustaz, tapi kalau mau cari gambaran awal biasanya lihat dulu di YouTube atau TikTok,” sementara informan lain menyebut bahwa media sosial membantunya “lebih cepat tahu isu-isu keagamaan yang lagi dibahas orang. (Informan 3, Hs)”

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa otoritas keislaman tidak lagi dipahami secara tunggal dan hierarkis, melainkan hadir dalam bentuk jaringan yang saling beririsan. Dalam praktiknya, santri seringkali memadukan otoritas pesantren dengan otoritas digital melalui proses negosiasi yang kontekstual. Ketika menemukan perbedaan pandangan antara konten media sosial dan pengajaran di pesantren, sebagian santri memilih melakukan cross-check kepada ustaz, sebagian lain menunda penerimaan hingga memperoleh penjelasan yang dianggap lebih lengkap, dan ada pula yang membedakan penggunaan otoritas berdasarkan konteks, misalnya mengikuti pandangan ustaz media sosial untuk motivasi dan penguatan spiritual, tetapi tetap merujuk kiai pesantren untuk praktik ibadah dan penentuan hukum. Pola ini menunjukkan bahwa santri tidak sepenuhnya tunduk pada logika popularitas digital, tetapi juga tidak sepenuhnya menutup diri dari otoritas baru yang muncul di ruang media.

Secara empiris, keberadaan berbagai sumber otoritas tersebut membentuk ruang negosiasi yang aktif dalam kehidupan keagamaan santri. Otoritas tidak diterima secara otomatis, melainkan dipertimbangkan berdasarkan beberapa faktor seperti kesesuaian dengan nilai pesantren, gaya penyampaian, kejelasan rujukan, serta dampak emosional yang ditimbulkan. Dengan demikian, relasi santri terhadap otoritas keislaman bersifat dinamis dan reflektif, di mana kepercayaan dibangun melalui proses pemilahan, pembandingan, dan penyesuaian makna antara tradisi pesantren dan arus keagamaan digital yang terus berkembang (Eickelman & Anderson, 2003; Hjarvard, 2008).

Tabel 3. Ekologi Otoritas Keislaman dan Pola Negosiasi Otoritas Santri (berdasarkan wawancara)

Sumber otoritas	Kanal/medium	Peran utama bagi santri	Dasar kepercayaan	Kerawanan yang dirasakan	Pola negosiasi yang muncul
Kiai pesantren	Pengajian, nasihat, kebijakan pesantren	Rujukan final untuk isu kebijakan dan praktik ibadah	Keilmuan, sanad, legitimasi institusional, otoritas moral	Tidak selalu merespons isu viral secara cepat	Menetapkan keputusan akhir; “kembali ke rujukan pesantren”
Ustaz/pengajar pesantren	Diniyah, halaqah, konsultasi	Klarifikasi, pendalaman konteks, penjelasan fikih/adab	Akses langsung, dialog dua arah, penjelasan lebih utuh	Keterbatasan waktu/akses	Cross-check dan verifikasi konten digital sebelum diyakini/diteruskan
Ustaz media sosial	Video pendek, live, potongan ceramah	Pengingat, motivasi, pengetahuan awal, isu kekinian	Ringkas, mudah dipahami, terasa relevan	Potongan konteks, logika viralitas, potensi polarisasi	Seleksi akun “adem”; dipakai sebagai pemanik lalu dikonfirmasi
Komunitas santri (WA/Telegram)	Grup diskusi dan berbagi konten	Penguatan sosial: saling mengingatkan, berbagi rujukan	Kedekatan relasi, respons cepat, kebutuhan harian	Efek ikut-ikutan, echo chamber, salah tafsir	Kontrol sosial: menahan konten debat; mendorong tanya ustaz
Algoritma/platform	FYP, suggested trending	Memperluas paparan tema/figur	Kemudahan akses; paparan berulang	Polarisasi; konten ekstrem/konfrontatif muncul berulang	

Secara ringkas, temuan ini menunjukkan bahwa santri hidup dalam lingkungan keagamaan yang memiliki banyak sumber rujukan, tidak lagi hanya bertumpu pada satu otoritas tunggal. Kiai dan ustaz pesantren tetap dipandang sebagai rujukan utama, terutama dalam persoalan ibadah dan keputusan keagamaan yang bersifat prinsipil, namun kehadiran media sosial memperluas akses santri terhadap berbagai figur dan wacana keislaman. Dalam praktiknya, santri memanfaatkan konten digital sebagai sumber awal pengetahuan dan pengingat religius,

tetapi tidak serta-merta menerimanya sebagai kebenaran akhir. Ketika muncul perbedaan pandangan, santri cenderung melakukan seleksi, verifikasi, dan penyesuaian dengan nilai pesantren. Dengan demikian, relasi santri terhadap otoritas keislaman berlangsung secara dinamis melalui proses pemilihan dan pertimbangan, bukan penerimaan yang bersifat otomatis.

Makna utama dari temuan pada sub-bab ini adalah bahwa otoritas keislaman di kalangan santri bekerja sebagai ekologi (bukan hierarki tunggal), sehingga kiai/ustaz pesantren tetap menjadi penentu legitimasi akhir, sementara otoritas digital (ustaz medsos, komunitas online, dan bahkan algoritma platform) berperan sebagai pemantik pengetahuan, pengingat, serta pintu awal akses wacana; kondisi ini memperkuat argumen kajian *digital religion* bahwa praktik beragama tidak hanya “termediasi” tetapi ikut dibentuk oleh logika dan kultur platform, serta sejalan dengan teori *mediatization* bahwa media dapat bertindak sebagai agen perubahan yang mensubordinasikan sebagian pengalaman beragama ke dalam logika media (misalnya ringkas-viral-polarisatif), yang kemudian direspon santri melalui negosiasi aktif seperti seleksi akun, penahanan konten debat, dan *cross-check* ke otoritas pesantren, sebuah pola yang menambah pengetahuan kita tentang bagaimana pluralisasi otoritas Islam di ruang publik baru berlangsung secara nyata di pesantren dan tidak selalu berujung pada “dominasi influencer”, melainkan pada pembentukan otoritas hibrid yang dinegosiasikan.

Moderasi Beragama sebagai Dampak: Dari Kesalehan Digital ke Ragam Moderasi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik kesalehan digital dan proses negosiasi otoritas berimplikasi langsung pada cara santri memahami dan mempraktikkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah informan menuturkan bahwa konten keagamaan yang mereka konsumsi melalui media sosial membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbedaan, baik dalam konteks perbedaan pendapat keagamaan maupun relasi sosial antarindividu. Beberapa santri menyebut bahwa mereka menjadi lebih berhati-hati dalam menyikapi perbedaan pandangan karena terbiasa melihat beragam penjelasan dari berbagai sumber, sekaligus belajar untuk tidak mudah menyalahkan pihak lain.

“Saya ngerasa setelah sering lihat kajian-kajian di [TikTok/YouTube/Instagram], terutama yang bahas adab sama akhlak, cara saya nanggepin perbedaan jadi lebih hati-hati. Soalnya di medsos itu saya lihat banyak banget pendapat, kadang beda-beda. Dulu mungkin saya gampang mikir ‘yang benar itu ini’, tapi sekarang saya lebih mikir, ‘oh ternyata ada penjelasan lain juga.’ Yang paling ngaruh itu yang penyampaiannya halus, ngajak baik-baik, bukan yang suka nyerang. Jadi kalau ada teman atau orang lain beda pendapat, saya nggak langsung nyalahin. Saya lebih milih dengerin dulu, terus kalau saya ragu saya tanya lagi ke [ustaz/kakak pembina] di pesantren. Buat saya, moderat itu bukan berarti semua dibolehin, tapi cara kita ngomong dan sikap kita itu jangan sampai bikin orang lain tersinggung atau jadi ribut.” (Informan 2, Ak)

Di sisi lain, temuan juga menunjukkan bahwa tidak semua paparan digital berdampak seragam. Dalam situasi tertentu, santri mengakui pernah menemukan konten yang bernada konfrontatif, mengandung labelisasi kelompok, atau menampilkan wacana keagamaan secara hitam–putih. Namun, berbeda dengan asumsi bahwa paparan tersebut otomatis mendorong sikap ekstrem, sebagian besar informan justru meresponsnya dengan sikap selektif, baik dengan menghindari konten tersebut, membatasi interaksi di kolom komentar, maupun mengembalikannya ke rujukan pesantren. Respons ini menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak muncul secara instan dari konten digital itu sendiri, tetapi terbentuk melalui proses refleksi dan penyaringan yang dilakukan santri.

Lebih jauh, temuan lapangan memperlihatkan bahwa moderasi beragama dipraktikkan secara kontekstual dan situasional. Dalam ruang pesantren, santri cenderung menampilkan sikap yang menekankan adab, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap nilai kolektif, sementara di ruang digital mereka belajar mengelola ekspresi keagamaan agar tidak memicu konflik. Moderasi dengan demikian tidak hanya hadir sebagai konsep normatif, tetapi sebagai praktik keseharian yang terus dinegosiasikan seiring perjumpaan santri dengan beragam wacana keagamaan di ruang digital dan tradisi pesantren.



Visual data tersebut memperlihatkan suasana kebersamaan santri dalam satu kegiatan keagamaan yang berlangsung secara kolektif di lingkungan pesantren. Kehadiran santri dalam satu ruang yang sama, duduk berdampingan, serta menampilkan ekspresi akrab dan terbuka menunjukkan kuatnya ikatan sosial dan nilai kebersamaan yang menjadi karakter utama kehidupan pesantren. Gambar ini membantu menjelaskan bahwa praktik keberagamaan santri tidak hanya berlangsung secara individual melalui media digital, tetapi juga tetap berakar pada interaksi langsung, relasi sosial, dan pengalaman komunal. Dengan demikian, visual ini menegaskan bahwa kesalehan digital yang berkembang di kalangan santri tidak menggantikan praktik keagamaan kolektif, melainkan berjalan berdampingan dengan tradisi kebersamaan yang telah lama menjadi fondasi pendidikan pesantren.

Berdasarkan data wawancara dan visual observasi, muncul tiga kecenderungan utama: moderasi beragama di kalangan santri lebih tampak sebagai praktik keseharian daripada sebagai konsep teoritis yang selalu disadari secara eksplisit; kesalehan digital mendorong sikap lebih hati-hati dalam menyikapi perbedaan karena paparan beragam pandangan membuat santri cenderung menunda penilaian, melakukan *cross-check*, dan tidak mudah terlibat dalam perdebatan konfrontatif; serta moderasi beragama berkembang secara kontekstual dan situasional, yakni di ruang pesantren terwujud melalui kepatuhan pada nilai kolektif dan otoritas kiai, sedangkan di ruang digital diwujudkan lewat pengendalian diri, pembatasan interaksi, dan seleksi konten, sehingga dapat disimpulkan sementara bahwa moderasi santri bersifat dinamis dan terus dibentuk melalui adaptasi antara tradisi pesantren dan dinamika media digital.

Implikasinya, data ini menambah pengetahuan tentang bagaimana moderasi beragama dapat berkembang secara organik di tengah arus digitalisasi, selama terdapat mekanisme sosial dan otoritas moral yang berfungsi sebagai penyeimbang. Dalam konteks ini, pesantren tidak kehilangan perannya di era digital, tetapi justru menjadi ruang penting yang memungkinkan santri mengelola keberagamaan digital secara reflektif. Dengan demikian, moderasi beragama tidak lahir dari penolakan terhadap teknologi, melainkan dari kemampuan institusi dan individu untuk menegosiasikan nilai-nilai keagamaan secara adaptif di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

Discussion

Penelitian ini menelaah bagaimana kesalehan digital santri di pesantren Kabupaten Bandung berkelindan dengan ekologi otoritas keislaman dan kemudian berimplikasi pada ragam moderasi beragama dalam praktik keseharian. Temuan utama menunjukkan, pertama, kesalehan digital santri tampil sebagai rutinitas religius yang “terjadwal” di sela aktivitas pesantren melalui konsumsi kajian singkat, penyimpanan (save) konten bertema adab–akhlik, serta berbagi konten kepada teman sebaya; praktik ini memperlihatkan bahwa pengalaman beragama santri tidak sekadar “dipindahkan” ke ruang online, tetapi juga dipengaruhi oleh kultur dan fitur platform seperti rekomendasi dan mekanisme berbagi (Campbell & Tsuria, 2021; Hjarvard, 2008). Kedua, temuan

memperlihatkan ekologi otoritas yang plural: kiai/ustaz pesantren tetap menjadi rujukan final, namun otoritas digital (ustaz media sosial, komunitas daring) dan bahkan algoritma platform hadir sebagai pemanfaatan pengetahuan dan pengingat; kondisi ini melahirkan pola negosiasi berupa seleksi akun “adem”, penahanan konten yang memicu debat, dan *cross-check* ke otoritas pesantren ketika ditemukan perbedaan pandangan (Eickelman & Anderson, 2003; Hosen, 2008). Ketiga, moderasi beragama tampak lebih menonjol sebagai praktik sosial (menjaga adab, keharmonisan relasi, menghindari konflik dan labelisasi) yang dijalankan secara kontekstual antara ruang pesantren dan ruang digital; temuan ini dapat dibaca selaras dengan kerangka moderasi beragama yang menekankan sikap tengah seperti toleransi dan anti-kekerasan, namun pada level santri ia terwujud melalui strategi literasi dan kurasi bermedia, bukan semata lewat wacana normatif (Kementerian Agama RI, 2019).

Hasil penelitian ini terjadi seperti yang ditemukan karena ada pertautan tiga mekanisme yang saling menguatkan: pertama, mekanisme platform (format video pendek, rekomendasi algoritmik, dan kemudahan *save/share*) membuat akses pengetahuan agama menjadi cepat, ringkas, dan repetitif sehingga santri wajar memanfaatkan konten digital sebagai “pengingat” di sela jadwal pesantren yang padat sejalan dengan argumen *digital religion* bahwa praktik beragama bukan hanya dimediasi, tetapi ikut dibentuk oleh logika dan kultur media digital (Campbell & Tsuria, 2021) dan juga kerangka *mediatization* bahwa media bekerja sebagai agen perubahan yang mensubordinasikan sebagian pengalaman beragama ke dalam logika media (Hjarvard, 2008) ; kedua, mekanisme institusional-kultural pesantren (adab, kepatuhan pada otoritas kiai/ustaz, dan norma menjaga harmoni) mendorong santri mengembangkan “rem” berupa kurasi konten aman dan verifikasi, sehingga paparan digital tidak otomatis menggantikan otoritas tradisional, melainkan membentuk ekologi rujukan yang plural namun tetap berjangkar pada legitimasi pesantren, kondisi yang konsisten dengan kajian bahwa media baru membentuk ulang ruang publik Muslim dan memengaruhi relasi otoritas, komunitas, dan produksi makna keagamaan (Eickelman & Anderson, 2003) ; ketiga, mekanisme kebutuhan sosial (menghindari debat, mengelola perbedaan, dan menjaga relasi) membuat negosiasi otoritas berfungsi sebagai jembatan dari kesalehan digital menuju moderasi beragama, karena santri belajar memilah konten, menunda penghakiman, dan *cross-check* ketika menemukan wacana yang konfrontatif, sejalan dengan temuan tentang otoritas keagamaan di ruang online Indonesia yang mendorong praktik pencarian rujukan dan verifikasi (Hosen, 2008) dan selaras dengan kerangka moderasi beragama yang menekankan sikap tidak mudah menyalahkan, toleransi, dan penolakan kekerasan dalam merespons perbedaan (Kementerian Agama RI, 2019).

Secara umum, temuan penelitian ini sejalan dengan studi-studi terdahulu yang menegaskan bahwa media sosial telah menjadi ruang penting bagi transformasi praktik keberagamaan generasi muda Muslim, baik melalui format dakwah digital yang ringkas dan mudah diakses, maupun melalui pembentukan gaya keberagamaan kontemporer seperti *hijrah* dan identitas religius baru (Muthohirin, 2021; Ihsan, 2020). Penelitian tentang otoritas Islam di ranah online juga menunjukkan bahwa internet mendorong perluasan sumber rujukan dan praktik pencarian fatwa/pengetahuan agama yang semakin “terbuka” (Hosen, 2008; Eickelman & Anderson, 2003), dan temuan Anda menguatkan hal itu dengan memperlihatkan bahwa santri memang berada dalam ekologi otoritas yang plural, di mana rujukan pesantren dan rujukan digital hadir bersamaan dan saling beririsan. Sementara itu, studi-studi moderasi beragama di pesantren umumnya menitikberatkan pada desain pendidikan, program, dan internalisasi nilai moderat melalui sistem pembelajaran serta kultur lembaga (misalnya studi kasus implementasi moderasi beragama di pesantren) (Oktaviana, 2025; Ulya, 2024). Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada cara ia menjembatani dua rumpun kajian yang sering berjalan parallel, digitalisasi keberagamaan dan moderasi beragama, dengan menunjukkan mekanisme mikro yang menghubungkan keduanya, yakni *negotiation of Islamic authority* melalui praktik kurasi konten “aman/adem”, penahanan konten yang memicu konflik, serta *cross-check* kepada ustaz/kiai sebagai “jangkar” legitimasi; dengan kata lain, moderasi beragama di kalangan santri tidak hanya muncul sebagai hasil kurikulum atau wacana normatif, tetapi sebagai praktik sosial yang diproduksi melalui negosiasi otoritas dalam keseharian bermedia.

Makna sosial dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa moderasi beragama di kalangan santri bukan terutama lahir dari slogan atau hafalan konsep normatif, melainkan tumbuh sebagai *habitus* sosial yang dijaga melalui adab, kehati-hatian berpendapat, dan pengelolaan konflik, sementara kesalehan digital memberi santri ruang baru untuk berinteraksi dengan keragaman wacana keislaman yang cepat, ringkas, dan mudah disirkulasikan; secara ideologis, kondisi ini memperlihatkan bahwa pesantren tidak sedang “dikalahkan” oleh media sosial, melainkan sedang bernegosiasi untuk mempertahankan otoritas moralnya di tengah proses *mediatization*, ketika pengalaman beragama makin dipengaruhi logika media seperti rekomendasi algoritmik, format pendek, dan potensi polarisasi, sehingga strategi kurasi konten “aman/adem” dan *cross-check* kepada

kiai/ustaz berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang agar ekspresi keberagamaan digital tidak jatuh ke arah ekstremisme atau konflik identitas (Hjarvard, 2008). Secara historis, temuan ini memperluas pemahaman tentang bagaimana media baru membentuk ulang “ruang publik Muslim” dengan memproduksi ekologi otoritas yang plural namun pada kasus santri, pluralisasi itu tidak otomatis meruntuhkan otoritas tradisional karena masih ditopang oleh institusi pesantren sebagai jangkar legitimasi (Eickelman & Anderson, 2003). Kontribusi yang lebih luas dari hasil ini adalah menunjukkan bahwa indikator moderasi beragama (misalnya menahan diri dari sikap ekstrem, menjaga toleransi, dan mengutamakan keadilan-keseimbangan) dapat dipahami secara lebih operasional sebagai praktik literasi dan etika bermedia, bukan hanya sebagai kebijakan atau kurikulum, sehingga memberi dasar konseptual bagi penguatan moderasi di era digital melalui pendekatan yang menggabungkan pendidikan pesantren dan pengelolaan ekosistem media yang dikonsumsi santri (Kementerian Agama RI, 2019; Campbell & Tsuria, 2021).

Secara fungsional, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesalehan digital dapat menjadi **sumber penguatan religiusitas** santri karena konten bertema adab–akhlik berperan sebagai “pingingat” yang mudah diakses di sela aktivitas pesantren, sekaligus memperluas wawasan santri tentang keberagaman pandangan sehingga mereka lebih berhati-hati dalam menyikapi perbedaan dan tidak mudah menghakimi; pada level sosial, mekanisme kurasi konten “aman/adem” dan kebiasaan *cross-check* kepada ustaz/kiai berfungsi sebagai **penjaga harmoni** yang membantu menekan potensi konflik dan polarisasi di ruang digital. Namun, disfungsi juga tampak karena paparan yang berulang terhadap konten keagamaan berformat pendek berisiko melahirkan pemahaman yang **parsial/terpotong konteks**, memindahkan otoritas dari kedalaman ilmu ke daya tarik retorika dan viralitas, serta membuka peluang terbentuknya *echo chamber* (lingkar informasi sejenis) yang menguatkan bias; dalam situasi tertentu, konten provokatif dan praktik “perang komentar” dapat mendorong ketegangan identitas, melemahkan adab dialog, dan menggeser moderasi dari sikap reflektif menjadi respons emosional, sehingga tanpa pendampingan, ruang digital berpotensi menjadi sumber kebingungan rujukan dan fragmentasi otoritas.

Berdasarkan temuan tersebut, tindakan kebijakan yang relevan bukanlah pelarangan total, melainkan **penguatan tata kelola dan literasi** agar kesalehan digital bergerak searah dengan nilai pesantren dan moderasi beragama. Pertama, pesantren dapat membangun **kurikulum literasi digital-keagamaan** yang praktis (misalnya cara memeriksa konteks potongan ceramah, membedakan pendapat khilafiyah, memahami rujukan kitab/ulama, dan etika berdiskusi di kolom komentar), sehingga santri memiliki alat untuk menilai konten secara kritis. Kedua, perlu disiapkan **mekanisme rujukan cepat** di internal pesantren—misalnya sesi “tanya ustaz” mingguan atau kanal konsultasi—agar kebiasaan *cross-check* yang sudah ada menjadi sistematis dan tidak bergantung pada akses informal. Ketiga, pesantren dapat melakukan **kurasi dan produksi konten resmi** (akun pesantren/ustaz, ringkasan ngaji, FAQ khilafiyah, konten adab bermedia) sehingga santri memiliki sumber digital yang kredibel dan kontekstual, sekaligus mengurangi ketergantungan pada konten luar yang tidak selalu selaras dengan tradisi pesantren. Keempat, dibutuhkan **kode etik bermedia** yang realistik (aturan waktu, ruang, dan adab interaksi) disertai pendampingan, bukan hanya kontrol, agar disiplin digital dipahami sebagai bagian dari pendidikan akhlak. Kelima, pada level kolaborasi, pesantren dapat bermitra dengan KUA/Kemenag, komunitas literasi digital, atau kampus setempat untuk pelatihan fasilitator dan penyusunan modul “moderasi beragama di ruang digital”, sehingga penguatan moderasi tidak berhenti pada wacana, tetapi teroperasionalisasi dalam kebiasaan santri saat memilih, menafsirkan, dan menyebarkan konten keagamaan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesalehan digital di kalangan santri pesantren di Kabupaten Bandung hadir sebagai rutinitas religius yang terintegrasi dalam keseharian, terutama melalui konsumsi kajian singkat, praktik menyimpan dan membagikan konten bertema adab–akhlik, serta kurasi konten yang dinilai “aman” dan sesuai nilai pesantren. Temuan juga memperlihatkan bahwa santri hidup dalam ekologi otoritas keislaman yang plural: otoritas kiai/ustaz pesantren tetap menjadi rujukan final, sementara otoritas digital berfungsi sebagai pemantik pengetahuan dan pingingat yang kemudian dinegosiasi melalui strategi seleksi akun, pembatasan interaksi, serta *cross-check* kepada otoritas pesantren. Dampaknya, moderasi beragama tampak lebih kuat sebagai praktik social yang dijalankan secara kontekstual antara ruang pesantren dan ruang digital.

Kontribusi Ilmiah Penelitian. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan pemahaman bahwa hubungan antara kesalehan digital dan moderasi beragama tidak bersifat otomatis, melainkan berlangsung melalui mekanisme mikro berupa negosiasi otoritas keislaman di tingkat keseharian santri. Dengan menempatkan pesantren sebagai ruang yang tidak sekadar “terdampak” digitalisasi tetapi juga aktif membangun “rem” sosial

dan epistemik (kurasi, verifikasi, dan adab bermedia), penelitian ini menawarkan perspektif konseptual tentang bagaimana moderasi beragama diproduksi sebagai praktik lived religion di era media sosial. Selain itu, penelitian ini memperkaya data empiris tentang dinamika santri sebagai aktor yang menghubungkan tradisi pesantren dan ekosistem media digital melalui pilihan, pertimbangan, dan strategi pengelolaan konten keagamaan.

Pengakuan atas Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama pada cakupan kasus dan kedalaman pelacakan jejak digital. Temuan belum dapat digeneralisasi untuk seluruh tipe pesantren karena konteks kelembagaan, aturan penggunaan gawai, serta karakter komunitas santri dapat berbeda antar-pesantren. Selain itu, penelitian ini belum mengobservasi secara longitudinal perubahan praktik dan preferensi santri dalam jangka panjang, sehingga dinamika negosiasi otoritas dari waktu ke waktu belum tergambar secara utuh. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas situs penelitian pada beberapa pesantren dengan karakter berbeda, mengombinasikan etnografi digital yang lebih mendalam dengan analisis jaringan/ekologi akun yang diikuti santri, serta menambahkan perspektif pengasuh/ustaz dan kebijakan pesantren agar pemetaan hubungan kesalehan digital, otoritas, dan moderasi beragama menjadi lebih komprehensif...

5. Referensi

- Ampbell, H. A., & Tsuria, R. (2021). *Digital religion: Understanding religious practice in digital media*. Routledge.
- APJII. (2023). Laporan survei penetrasi internet Indonesia 2023. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Azra, A. (2017). *Islam Indonesia: Kontinuitas dan perubahan*. Prenada Media.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Campbell, H. A. (2013). *Digital religion: Understanding religious practice in new media worlds*. Routledge.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage.
- Eickelman, D. F., & Anderson, J. W. (2003). *New media in the Muslim world: The emerging public sphere* (2nd ed.). Indiana University Press.
- Fealy, G., & White, S. (2008). *Expressing Islam: Religious life and politics in Indonesia*. ISEAS.
- Hefner, R. W. (2011). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hjarvard, S. (2008). The mediatization of religion: A theory of the media as agents of religious change. *Northern Lights*, 6(1), 9–26. https://doi.org/10.1386/nl.6.1.9_1
- Hosen, N. (2008). Online fatwa in Indonesia: From fatwa shopping to Googling a kiai. In G. Fealy & S. White (Eds.), *Expressing Islam: Religious life and politics in Indonesia* (pp. 159–173). ISEAS.
- Husein, F. (2018). Piety, paradox, and media: Negotiating Islamic ethics on social media. *Contemporary Islam*, 12(3), 255–273. <https://doi.org/10.1007/s11562-017-0408-9>
- Ihsan, M. (2020). Media sosial dan pembentukan identitas keagamaan generasi muda Muslim. *Jurnal Komunikasi Islam*, 10(1), 23–41.
- Kementerian Agama RI. (2019). Moderasi beragama. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Khotdriyah, S. (2024). Dakwah pesantren di era digital: Tantangan dan peluang. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 145–160.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing*. Sage.
- Luthvia, R., & Nugroho, H. (2024). Pesantren and religious moderation: Cultural accommodation and social harmony. *Journal of Islamic Studies and Society*, 5(1), 66–82.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Muthohirin, N. (2021). Hijrah movement and digital piety among Indonesian youth. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 17(2), 179–201.
- Muthohirin, N. (2025). Digital Islam and youth religiosity in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and*

- Muslim Societies, 15(1), 1–22.
- Pink, S., Horst, H., Postill, J., Hjorth, L., Lewis, T., & Tacchi, J. (2016). Digital ethnography: Principles and practice. Sage.
- Putri, D. A. (2023). Media sosial dan otoritas keagamaan di kalangan santri. *Jurnal Sosiologi Agama*, 17(1), 45–62.
- Rahman, F. (2022). Negotiating religious authority in Indonesian pesantren. *Studia Islamika*, 29(2), 295–322.
- Saldaña, J. (2016). The coding manual for qualitative researchers (3rd ed.). Sage.
- Salma, N. (2024). Transformasi dakwah pesantren melalui media sosial. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 8(1), 87–104.
- Suryana, A. (2023). Internalizing religious moderation in pesantren education. *Journal of Islamic Education Studies*, 6(2), 121–138.
- Ulya, I. (2024). Moderasi beragama dalam kurikulum pesantren. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 21(1), 55–70.
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). Sage.
- Zaid, A. (2020). Authority, algorithm, and Islamic preaching on YouTube. *Journal of Religion, Media and Digital Culture*, 9(3), 317–336.
- Zulkifli. (2013). The ulama in Indonesia: Between religious authority and political power. *Journal of Indonesian Islam*, 7(1), 1–26.